Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian dapat menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2014 merupakan media pertanggungjawaban yang menggambarkan pencapaian keberhasilan atau kegagalan kinerja atas pelaksanaan tugas dan kegiatan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Ditjen Binfar dan Alkes sepanjang tahun 2014 dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Ditjen Binfar dan Alkes tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh pegawai dan unit-unit lintas sektor terkait. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap masukan dari berbagai pihak dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Ditjen Binfar dan Alkes tahun 2014.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Produksi Dan Distribusi Kefarmasian Ditjen Binfar dan Alkes tahun 2014 dapat memberikan informasi dan gambaran penyelenggaraan kegiatan peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian pada program kefarmasian dan alat kesehatan yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang obyektif dalam rangka peningkatan kinerja.

Jakarta, 27 Januari 2015
Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Dra. R. Dettie Yuliati, Apt., M.Si.
NIP. 195812151989112001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Ikhtisar Eksekutif iii

BAB.I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1

B. Tujuan 2

C. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi 2

D. Sistematika 3

BAB.II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 4

A. Perencanaan Kinerja 4

B. Perjanjian Kinerja 5

BAB.III Akuntabilitas Kinerja 6

A. Pengukuran Kinerja 6

B. Sumber Daya 7

C. Analisis Akuntabilitas Kinerja 10

D. Kegiatan Perizinan 21

E. Realisasi Anggaran 22

BAB.IV Penutup 24

Lampiran 1 25

Lampiran 2 26

Lampiran 3 27

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014, Direktorat Bina Produksi dan Distribususi Kefarmasian Ditjen Binfar dan Alkes melaksanakan kegiatan peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian pada program kefarmasian dan alat kesehatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2014 merupakan laporan akuntabilitas tahun terakhir dalam pencapaian kinerja Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 - 2014.

Laporan Akuntabilitas Kinerja berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan pencapaian kinerja tahun 2014. Rencana kinerja tahun 2014 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2014 yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 - 2014 sedangkan capaian kinerja merupakan realisasi kegiatan selama tahun 2014 yang diarahkan untuk pemenuhan target yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2014.

Realisasi pencapaian luaran/output Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian adalah sebagai berikut :

LUARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014	REALISASI 2014	CAPAIAN 2014
1. Meningkatnya produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian	1. Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri.	45	81	180%
2. Meningkatnya kualitas produksi dan distribusi kefarmasian 3. Meningkatnya produksi bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri	2. Jumlah standar produk kefarmasian yang disusun dalam rangka pembinaan produksi dan distribusi	10	10	100%

Keberhasilan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras dan komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai dilingkungan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian untuk fokus dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 - 2014.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Hal ini sejalan dengan Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada pasal 3 menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalisme, asas profesionalisme dan asas akuntabilitas.

Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus dilakukan secara obyektif. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Upaya pembangunan kesehatan salah satunya dilaksanakan melalui peningkatan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan.

Prioritas pembangunan kesehatan pada tahun 2010 - 2014 adalah peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan. Dalam hal ini dilakukan dengan berbagai kegiatan utama dan penunjang dalam rangka mendorong prioritas tersebut yang diwujudkan dalam rencana strategis.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 021/Menkes/SK/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 - 2014 telah ditetapkan sasaran hasil Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan adalah meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk mencapai sasaran hasil tersebut maka Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian melakukan kegiatan peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian pada program Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan hasil meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat, serta indikator kinerja kegiatan berupa jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri dan jumlah standard produk kefarmasian yang disususn dalam rangka pembinaan produksi dan distribusi.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan, maka Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Ditjen Binfar dan Alkes sebagai Satuan Kerja Eselon II wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi yang disusun mengacu pada rencana strategis, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja dan hasil pengukuran kinerja.

B. TUJUAN

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian bertujuan :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang memuat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
2. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan
3. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang
4. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang
5. Penyempurnaan bagi kebijakan yang diperlukan

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi dan distribusi kefarmasian.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian;
2. Pelaksanaan kegiatan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi kefarmasian;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, kajian, dan analisis di bidang produksi dan distribusi kefarmasian;
5. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian;
6. Pelaksanaan perizinan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian terdiri atas :

1. Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional;
2. Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan;
3. Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Sediaan Farmasi Khusus;
4. Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat;
5. Subbagian Tata Usaha; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

D. SISTEMATIKA

Laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2014 ini menjelaskan pencapaian kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian selama tahun 2014. Pencapaian kinerja tersebut dibandingkan dengan perjanjian kinerja (penetapan kinerja) sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

Bab I - Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, tujuan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, sumber daya manusia dan sistematika penyusunan laporan.

Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan Rencana Strategis untuk periode 2010 - 2014 dan perjanjian kinerja tahun 2014.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran kinerja, pencapaian kinerja tahun 2014, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2014.

Bab IV - Penutup, menjelaskan kesimpulan atas laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian tahun 2014.

Lampiran-lampiran

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses perencanaan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Perencanaan kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara sistematis, terarah dan terpadu.

Visi dan Misi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Kesehatan sesuai Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 - 2014 sebagai berikut :

1. VISI KEMENTERIAN KESEHATAN

"MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN"

2. MISI KEMENTERIAN KESEHATAN

Untuk mencapai masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan ditempuh melalui misi sebagai berikut :

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani
b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan
c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan
d. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik

3. TUJUAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

4. NILAI NILAI KEMENTERIAN KESEHATAN

Guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai yaitu :

a. Pro Rakyat
b. Inklusif
c. Responsif
d. Efektif
e. Bersih

5. SASARAN DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN

Sasaran Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian tercermin dalam luaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian
b. Meningkatnya kualitas produksi dan distribusi kefarmasian
c. Meningkatnya produksi bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri

Indikator pencapaian luaran tersebut sesuai dengan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2010 - 2014 adalah :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri	5 jenis	15 jenis	25 jenis	35 jenis	45 jenis
2.	Jumlah standar produk kefarmasian yang disusun dalam rangka pembinaan produksi dan distribusi	2 standar	4 standar	6 standar	8 standar	10 standar

B. PERJANJIAN KINERJA

Di dalam perencanaan kinerja ditetapkan target kinerja tahun 2014 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat luaran dan kegiatan. Target kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2014 sebagai mana diuraikan pada Tabel 1 menjadi komitmen bagi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian untuk mencapainya pada tahun 2014.

Tabel 1. Target Kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen Binfar dan Alkes Tahun 2014

LUARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian 2. Meningkatnya kualitas produksi dan distribusi kefarmasian 3. Meningkatnya produksi bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri	1. Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri	45 jenis
	2. Jumlah standar produk kefarmasian yang disusun dalam rangka pembinaan produksi dan distribusi	10 standar

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indicator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran tingkat capaian kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 - 2014. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan kegiatan di masa yang akan datang agar setiap kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Pengukuran kinerja dapat memberikan gambaran kepada pihak pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Luaran / output merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh kegiatan peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai luaran, perlu ditinjau indikator kegiatan peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian yang telah ditetapkan. Luaran indikator kegiatan peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian
2. Meningkatnya kualitas produksi dan distribusi kefarmasian
3. Meningkatnya produksi bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri

Besaran target dan realisasi masing-masing indikator Tahun 2014 tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2014

LUARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014	REALISASI 2014	CAPAIAN 2014
1. Meningkatnya produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian	1. Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri.	45	81	180%
2. Meningkatnya kualitas produksi dan distribusi kefarmasian 3. Meningkatnya produksi bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri	2. Jumlah standar produk kefarmasian yang disusun dalam rangka pembinaan produksi dan distribusi	10	10	100%

B. SUMBER DAYA

Dalam mencapai kinerja, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian didukung dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran.

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Keadaan pegawai di lingkungan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian sampai akhir tahun 2014 berjumlah 36 orang dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2014

NO	J A B A T A N	JUMLAH
A.	**Menurut Jabatan**	
	Jabatan Struktural	14 orang
	Jabatan Fungsional Umum	22 orang
B.	**Menurut Golongan**	
	Golongan II	3 orang
	Golongan III	26 orang
	Golongan IV	7 orang
C.	**Menurut Pendidikan**	
	S2	9 orang
	Apoteker	18 orang
	Sarjana Farmasi	3 orang
	Sarjana Hukum	1 orang
	Sarjana Administrasi	1 orang
	D3	2 orang
	SMF	1 orang
	SLTP	1 orang
	Total SDM	36 orang

Jenis dan tingkat pendidikan tersebut menunjukan kekuatan sumber daya manusia Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Dengan kondisi yang ada dirasa perlu selalu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian sehingga akan mampu memberikan masukan, mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang kesehatan.

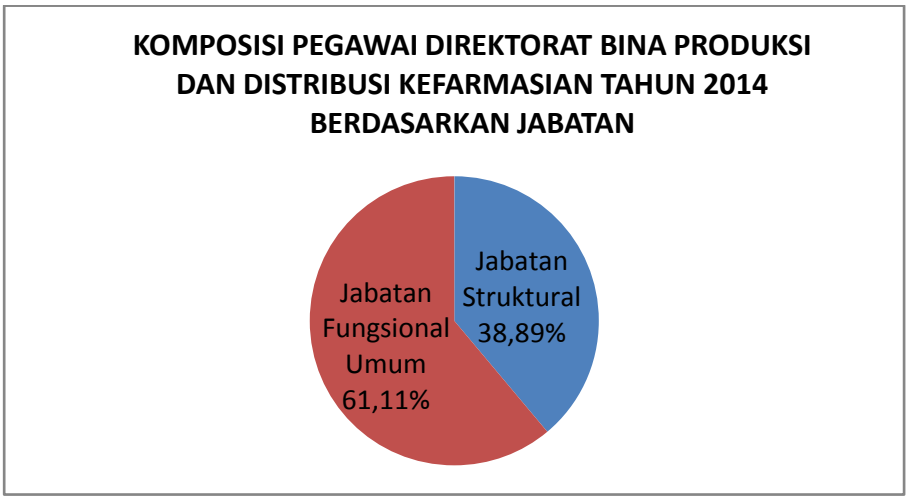

Diagram 1. Komposisi Pegawai Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2014 Berdasarkan Jabatan

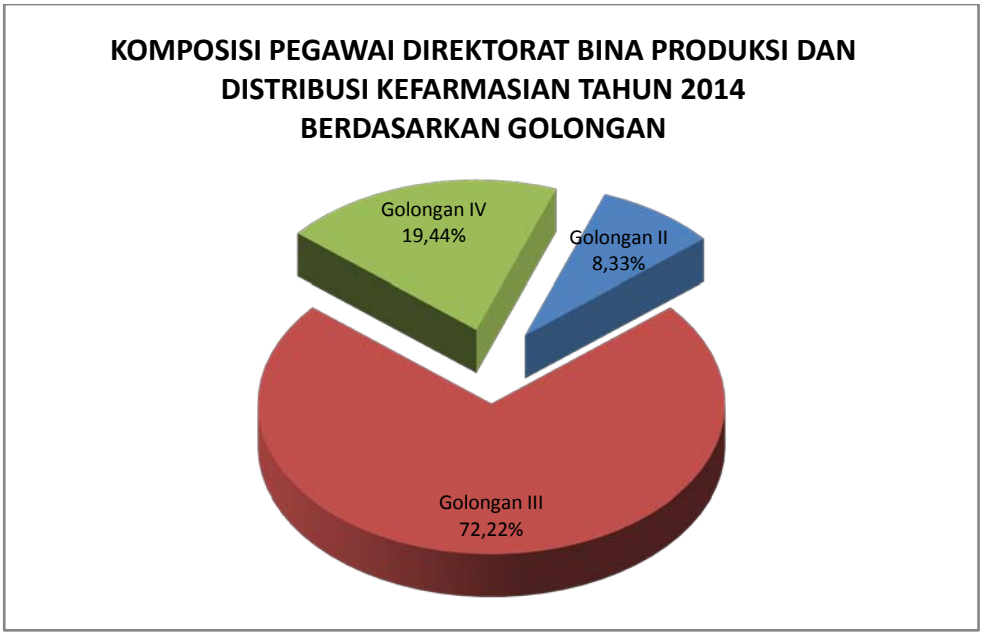

Diagram 2. Komposisi Pegawai Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2014 Berdasarkan Golongan

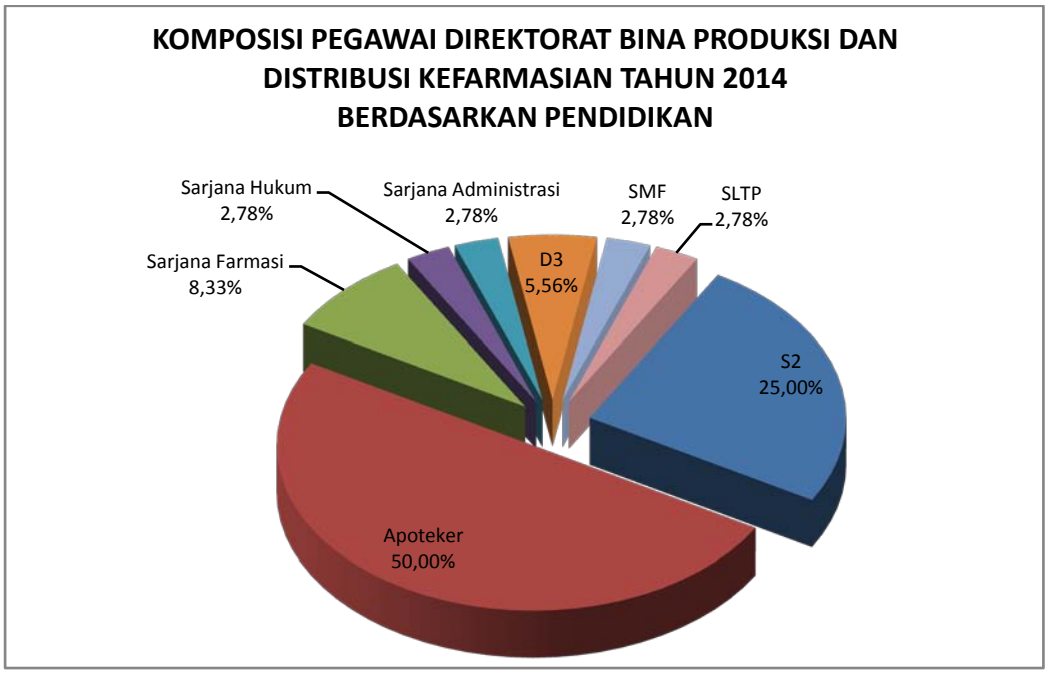

Diagram 3. Komposisi Pegawai Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2014 Berdasarkan Pendidikan

2. ANGGARAN

Dalam mencapai sasaran kinerjanya, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Ditjen Binfar dan Alkes didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN dan PNBP. Anggaran DIPA Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 63.611.450.000,-

C. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian tahun 2014 disusun menggunakan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 - 2014 dan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

Indikator Kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian adalah jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri dan jumlah standard produk kefarmasian yang disusun dalam rangka pembinaan produksi dan distribusi.

Dalam rangka meningkatkan produksi dan distribusi kefarmasian maka Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian melakukan berbagai kegiatan yang mendukung luaran: meningkatnya produksi bahan bakun dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian, meningkatnya kualitas produksi dan distribusi kefarmasian, dan meningkatnya produksi bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri. Berikut ini akan diuraikan pencapaian indikator kinerja dari Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian.

C.1. INDIKATOR PERTAMA

Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri

Definisi operasional dari bahan baku obat dan obat tradisional yang diproduksi di dalam negeri yaitu: “bahan awal penyusun sediaan farmasi (obat dan obat tradisional) dapat berupa bahan berkhasiat maupun bahan tambahan yang merupakan hasil penerapan teknologi maupun bahan alam yang siap diproduksi”.

Kondisi yang dicapai :

Pada tahun 2014, jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri yang tersedia mencapai 81 jenis dari target yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan adalah dengan pendirian kelompok kerja kemandirian bahan baku obat beranggotakan lintas kementerian dan stakeholder terkait lain dengan Kementerian Kesehatan sebagai koordinator. Pencapaian kemandirian obat dan bahan baku obat juga terutama dilakukan melalui kerjasama dan fasilitasi penelitian dengan lembaga penelitian (BPPT, LIPI dan Perguruan Tinggi) di bidang pengembangan bahan baku obat serta pembentukan jejaring dengan berbagai stakeholder diantaranya institusi penelitian, kalangan industri dan asosiasi pengusaha.

Pada tahun 2011 dilakukan kerjasama dengan lembaga riset milik swasta (DLBS), kemudian dilakukan peningkatan kerjasama dengan Kementerian Riset dan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2012. Pada tahun 2013 dan 2014 dilakukan optimalisasi dengan kementerian terkait

yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Riset dan Teknologi.

Perbaikan skema kerja sama pengembangan bahan baku dan bahan baku obat tradisional dilakukan sehingga tidak hanya berorientasi pada produk, tetapi juga pada proses produksi lebih lanjut. Hal ini diperkuat dengan adanya Peta Jalan Pengembangan Bahan Baku dan Rencana Induk Pengembangan Bahan Baku Obat Tradisional Di Indonesia.

Untuk mencapai kemandirian di bidang obat tradisional, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian telah melaksanakan fasilitasi peralatan untuk Pusat Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) dan Pusat Ekstrak Daerah (PED), serta fasilitasi peralatan laboratorium mikrobiologi untuk setiap fasilitas P4TO dan PED.

Daftar penerima fasilitas P4TO dan PED tahun 2012 - 2014 dapat dillihat pada Tabel 4. Sedangkan daftar jenis bahan baku obat dan obat tradisional yang telah siap diproduksi di dalam negeri (kumulatif tahun 2011 - 2014) dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 4. Daftar Penerima Fasilitas P4TO dan PED

NO	Daerah	P4TO / PED	TAHUN
1	Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah	P4TO	2012
2	Provinsi Sumatera Utara	P4TO	2012
3	Provinsi Kalimantan Selatan	P4TO	2012
4	Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu	P4TO	2013
5	Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah	P4TO	2013
6	Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah	P4TO	2013
7	Kabupaten Bangli Provinsi Bali	P4TO	2013
8	Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan	P4TO	2014
9	Kabupaten Tulang Bawang Barat Ptovinsi Lampung	P4TO	2014
10	B2P2TOOT Tawangmangu	P4TO	2014
11	Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah	PED	2013
12	B2P2TOOT Tawangmangu	PED	2014
13	Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu	PED	2014

Tabel 5. Daftar Nama Bahan Baku Obat dan Bahan Baku Obat Tradisional Yang Telah Siap Diproduksi Di Dalam Negeri

NO	BBO / BBOT	KERJASAMA A-B-G	TAHUN
1	Fraksi bioaktif kayu manis *(Cinamomum burmani)*	DLBS	2011
2	Fraksi bioaktif bungur *(Lagerstroemia speciosa)*	DLBS	2011
3	Fraksi bioaktif mahkota dewa *(Phaleria macrocara)*	DLBS	2011

4	Fraksi protein bioaktif cacing tanah *(Lumbricus Rubellus)*	DLBS	2011
5	Ekstrak herba sambiloto *(Andrographis paniculata)*	BPPT	2012
6	Ekstrak herba sambiloto terfraksinasi	BPPT	2012
7	Ekstrak pegagan (*Centella asiatica*)	BPPT	2012
8	Ekstrak pegagan terfraksinasi	BPPT	2012
9	Ekstrak herba meniran *(Phyllanthus niruri*)	BPPT	2012
10	Ekstrak herba meniran terfraksinasi	BPPT	2012
11	Ekstrak rimpang temulawak (*Curcuma xanthorriza*)	BPPT	2012
12	Ekstrak rimpang jahe (*Zingiber officinale*)	BPPT	2012
13	Ekstrak rimpang kencur (*Kaempferia galanga*)	BPPT	2012
14	Difruktosa anhidrida III	LIPI	2012
15	Pati ter-pregelatinasi	BPPT	2012
16	Ekstrak terstandar legundi (*Vitex trifolia* Linn)	UNHAS-PT. Indofarma	2013
17	Ekstrak terstandar paliasa (*Kleinhovia hospita* linn.)	UNHAS-PT. Indofarma	2013
18	Ekstrak rumput laut *Eucheuma cottonii*	UNHAS-PT. Indofarma	2013
19	Karaginan rumput laut	UNHAS-PT. Indofarma	2013
20	Ekstrak terstandar pugun tano (*Curanga fel-terrae*)	USU-PT. Sumatera Busan	2013
21	Ekstrak terstandar daun jati belanda *(Guazuma ulmifolia)*	USU-PT. Sumatera Busan	2013
22	Ekstrak terstandar herba sidaguri *(Sida rhombifolia)*	USU-PT. Sumatera Busan	2013
23	Ekstrak terstandar daun sirsak *(Annona muricata L.)*	USU-PT. Sumatera Busan	2013
24	Ekstrak terstandar biji buah kedaung *(Parkia timoriana)*	USU-PT. Sumatera Busan	2013
25	Ekstrak terstandar daun salam *(Syzygium polyanthum)*	BPPT-PT. Tri Rahardja	2013
26	Tetrasiklin	BPPT-PT. Indofarma	2013
27	Albumin	BPPT-PT. Indofarma	2013
28	Ekstrak Terstandar Pegagan (*Centella asiatica* L.)	UNAND-PT. Nusantara Beta Farma	2013
29	Fraksi triterpen Pegagan	UNAND-PT. Nusantara Beta Farma	2013
30	Isolat pegagan (asiatikosida)	UNAND-PT. Nusantara Beta Farma	2013

31	Isolat pegagan (asam madekasat)	UNAND-PT. Nusantara Beta Farma	2013
32	Isolat pegagan (asam asiatat)	UNAND-PT. Nusantara Beta Farma	2013
33	Ekstrak terstandar *Ganoderma lucidum*	LIPI-CV. Media Argo Merapi	2013
34	2-Metoksi-isobutilisonitril (MIBI)	ITB-BATAN	2013
35	Amilum jagung pulut ter-pragelatinasi-hidrolisis enzimatik-fosforilasi	ITB-PT. Darya Varia Laboratoria	2013
36	Ekstrak terstandar kulit buah manggis *(Garcinia mangostana L.)*	UNAIR-CV. Agaricus Sido Makmur Sentosa	2013
37	Ekstrak terstandar herba tapak dara *(Catharanthus roseus)*	UNAIR-CV. Agaricus Sido Makmur Sentosa	2013
38	Ekstrak terstandar umbi bawang putih *(Allium sativum L.)*	UNAIR-CV. Agaricus Sido Makmur Sentosa	2013
39	Ekstrak terstandar Biji Mahoni [*Swietenia mahagoni* (L.) Jacq.]	UGM-PT. Swayasa Prakarsa	2013
40	Lovastatin	BPPT-N/A	2014
41	Ekstrak Terstandar Rimpang Temu Ireng	BPPT-PT. Tri Rahardja	2014
42	Ekstrak Terstandar Batang Brotowali	BPPT-PT. Jago (Semarang)	2014
43	Sinensetin (isolat marker) dari dari Herba dan Ekstrak Kumis Kucing *(Orthosiphon stamineus)*	BPPT-PT. Kimia Farma	2014
44	Metilpariokhromen (isolat marker) dari dari Herba dan Ekstrak Kumis Kucing *(Orthosiphon stamineus)*	BPPT-PT. Kimia Farma	2014
45	Ekstrak Terstandar Daun Tempuyung *(Sonchus arvensis L.)*	ITB-PT. Kimia Farma	2014
46	Kitosan Rantai Pendek	ITB-PT. Avicenna Multi Sainteknika	2014
47	Ekstrak Terstandar Temu Kunci *(Boesenbergia pandurata)*	ITB-PT. Ilthabi Sentra Herbal	2014
48	Fiber (serat) Batang Nanas *Pharmaceutical Grade*	ITB-DLBS	2014
49	Eksipien Pati Batang Nanas *Pharmaceutical Grade*	ITB-DLBS	2014
50	Propacetamol	LIPI-N/A	2014
51	Dimer Paracetamol	LIPI-N/A	2014
52	Ekstrak Terstandarisasi Temu Putih *Curcuma zedoaria*	UGM-PT. Swayasa Prakarsa	2014
53	Ekstrak Terstandarisasi Kemukus *Piper cubeba*	UGM-PT. Swayasa Prakarsa	2014

54	Ekstrak Terstandarisasi Seledri *Apium graveolens*	UGM-PT. Swayasa Prakarsa	2014
55	Ekstrak Etanolik Terstandar Daun Jambu Mete (Anacardium occidentale L.)	UGM-PT. Swayasa Prakarsa	2014
56	Ekstrak Aktif Terstandar Daun Awar-awar *Ficus septica*	UGM-PT. Swayasa Prakarsa	2014
57	Ekstrak Daun Sambung Nyawa *(Gynura procumbens)*	UGM-PT. Phapros	2014
58	Ekstrak Etanol Costus speciosus	UGM-PT. Swayasa Prakarsa	2014
59	Ekstrak Terstandarisasi Daun Kumis Kucing	UNAIR-CV. Agaricus Sido Makmur Sentosa	2014
60	Ekstrak Terstandarisasi Rimpang Temu Mangga	UNAIR-CV. Agaricus Sido Makmur Sentosa	2014
61	Isolat a-mangostin dari Manggis *(Garcinia mangostana)*	Unand-CV Herbal Analitika	2014
62	Isolat andrographolide dari Sambiloto *(Andrographis paniculata)*	Unand-CV Herbal Analitika	2014
63	Isolat piperin dari Merica *(Piper nigrum)*	Unand-CV Herbal Analitika	2014
64	Isolat Ethyl p-methoxy-trans-cinnamate dari Kencur *Kaempferia galanga*	Unand-CV Herbal Analitika	2014
65	Isolat Kaempferol dari Paku resam *Gleichenia linearis*	Unand-CV Herbal Analitika	2014
66	Isolat Skopoletin dari Mengkudu *(Morinda citrifolia)*	Unand-CV Herbal Analitika	2014
67	Isolat Luteolin dari Kacang Tanah *(Arachis hypogea)*	Unand-CV Herbal Analitika	2014
68	Isolat Apigenin dari Seledri *(Apium graviolen)*	Unand-CV Herbal Analitika	2014
69	Isolat Tilirosid dari *Guazuma ulmifolia*	Unand-CV Herbal Analitika	2014
70	Isolat Kuersitrin dari Loranthus sp	Unand-CV Herbal Analitika	2014
71	Ekstrak Terpenoid Terstandarisasidari Tumbuhan *Elephantopus scaber L.*	UNAND-PT. Nusantara Beta Farma	2014
72	Isolat Deoksielephantopin dari Tumbuhan *Elephantopus scaber L.*	UNAND-PT. Nusantara Beta Farma	2014
73	Isolat Iso-deoksielephantopin dari Tumbuhan *Elephantopus scaber L.*	UNAND-PT. Nusantara Beta Farma	2014

74	Ekstrak Terstandar Kasumba Turate *(Cartamus tinctorius Linn.)*	Unhas-PT. Royal Medicaling Pharmalab	2014
75	Antibiotik Actinomycin Dari *Streptomyces parvulus*	UNHAS-N/A	2014
76	Ester Ibuprofen-metil glukopyranoside *via* Biokatalis Lipase Terimmobilisasi	UNHAS-N/A	2014
77	Ester ibuprofen etil glukopiranosida *via* Biokatalis Lipase Terimmobilisasi	UNHAS-N/A	2014
78	Ester ibuprofen-propil glukopiranosida *via* Biokatalis Lipase Terimmobilisasi	UNHAS-N/A	2014
79	Isolat Fucoidan Terstandar Rumput Laut Coklat *(Sargassum sp)*	UNHAS-N/A	2014
80	Dekstrin dari Ubi Kayu *(Manihot utilisima)*	USU-PT. Sumatera Busan	2014
81	Ekstrak Temugiring *(Curcuma heyneana)*	USU-PT. Sumatera Busan	2014

Target, realisasi dan capaian pada tahun 2014 dapat dillihat pada Tabel 6. Sedangkan perbandingan target, realisasi dan capaian sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 (kumulatif) dapat dilihat pada Tabel 7 dan Grafik 1.

Tabel 6. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi di Dalam Negeri Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014	REALISASI 2014	CAPAIAN
Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri	45	81	180%

Tabel 7. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi di Dalam Negeri Tahun 2011 - 2014

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri	15	4	26,7 %	25	15	60 %	35	39	111,4 %	45	81	180 %

T = Target R = Realisasi C = Capaian

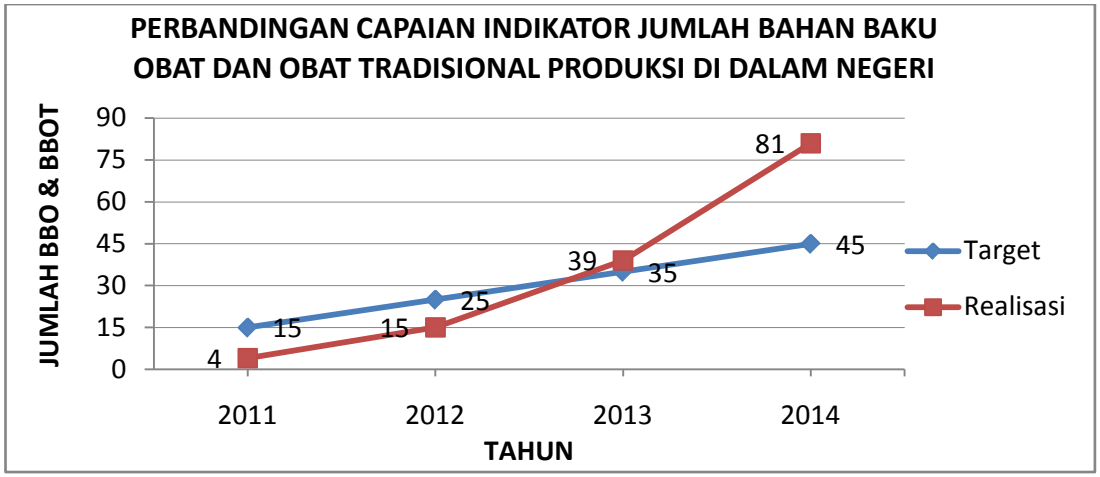

Grafik 1. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Produksi di Dalam Negeri

Dalam mencapai indikator jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri, pada tahun 2014 telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Review Kebijakan Terkait Pengembangan Obat dan Bahan Baku Obat
2. Review Kebijakan Investasi Produksi Bahan Baku Obat
3. Pembinaan Industri BBO/BBOT
4. Aliansi Strategis Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat
5. Fasilitasi Terlaksananya Iklim Kondusif Pengembangan Industri Farmasi dan Industri Bahan Baku Farmasi
6. Workshop Masa Depan Pengembangan Bahan Baku Farmasi di Indonesia
7. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Produksi Bahan Baku Obat dan Bahan Baku Obat Tradisional
8. Fasilitasi Pemenuhan PQ-WHO
9. Sosialisasi dan Advokasi Pedoman Pengembangan dan Produksi Bahan Baku Obat
10. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM P4TO dan PED
11. Pendampingan, Monitoring, dan Evaluasi P4TO dan PED
12. Pelatihan Produksi dan Advokasi CPOTB Fasilitas P4TO dan PED
13. Fasilitasi Peralatan Laboratorium Mikrobiologi Pada PED/P4TO
14. Advokasi dan Revitalisasi Industri Farmasi Untuk Memproduksi BBO di Indonesia
15. Sosialisasi Cara Pembuatan Bahan Aktif Obat Yang Baik
16. Penyediaan Referensi Nasional dan Internasional
17. Fasilitasi Peralatan P4TO dan PED Tahun 2014
18. Penandatanganan MOU/ Perjanjian Kerjasama P4TO/PED/Laboratorium Mikrobiologi/Penelitian
19. Penyusunan Buku Informasi Industri Farmasi Edisi II
20. Fasilitasi Perjalanan Panitia Penerima dan Tim Teknis P4TO/PED/Lab. Mikro ke Provinsi
21. Harmonisasi Kebijakan Terkait Distribusi Obat
22. Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan dalam Pengembangan BBO

C.2. INDIKATOR KEDUA

Jumlah standar produk kefarmasian yang disusun dalam rangka pembinaan produksi dan distribusi

Definisi operasional dari standar produk kefarmasian yaitu: “dokumen tertulis berisi ketentuan yang menunjukan persyaratan atau acuan teknis kefarmasian dan / atau makanan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan / atau Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya”.

Kondisi yang dicapai:

Penyusunan standar produk kefarmasian perlu dilaksanakan untuk meningkatkan mutu produk kefarmasian sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap keamanan, khasiat dan mutu bagi kesehatan masyarakat serta menjadi standar bagi produsen agar bisa menghasilkan produk yang baik dan sesuai standar agar aman dipergunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Penyusunan standar dilaksanakan seiring dengan perubahan dan menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan di lapangan. Kegiatan penyusunan standar dalam bidang produksi dan distribusi kefarmasian pada dasarnya dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan pembangunan kesehatan yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian. Mengingat bidang produksi dan distribusi kefarmasian merupakan salah satu bidang yang sangat dinamis, kompleks dan multi-dimensi maka perlu dilaksanakan penyusunan standar yang sistematik dan komprehensif yang dapat menjadi pedoman pelaksanaan produksi dan distribusi yang baik dan benar.

Pada tahun 2011 Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian telah menghasilkan 4 standar produk kefarmasian, kemudian 6 standar pada tahun 2012 dan 9 standar pada tahun 2013. Pada tahun 2014 Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian telah menghasilkan 10 standar produk kefarmasian.

Standar produk kefarmasian yang disusun pada tahun 2014 adalah :

1. Farmakope Indonesia Edisi V
2. Daftar Tilik UJG - UJR
3. Daftar Tilik UMOT
4. Kodeks Kosmetika Indonesia
5. Materia Kosemtika Bahan Alam Indonesia
6. Pedoman Pembinaan Makanan Sehat
7. Pedoman Pembinaan Sarana Produksi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi
8. Pedoman Pembinaan Sarana Distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi
9. Pedoman Perizinan Elektronik
10. Pedoman Pelaporan Elektronik

Target, realisasi dan capaian pada tahun 2014 dapat dillihat pada Tabel 8. Sedangkan perbandingan target, realisasi dan capaian sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 9 dan Grafik 2.

Tabel 8. Target, Indikator Kinerja dan Capaiannya Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2014	REALISASI 2014	CAPAIAN
Jumlah standar produk kefarmasian yang disusun dalam rangka pembinaan produksi dan distribusi	10 standar	10 standar	100%

Tabel 9. Perbandingan Target, Indikator Kinerja dan Capaiannya Tahun 2011-2014

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2011			Tahun 2012			Tahun 2013			Tahun 2014		
	T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
Jumlah standar produk kefarmasian yang disusun dalam rangka pembinaan produksi dan distribusi yang diselesaikan	4	4	100 %	6	6	100 %	8	9	112,5 %	10	10	100 %

T = Target; R = Realisasi; C = Capaian

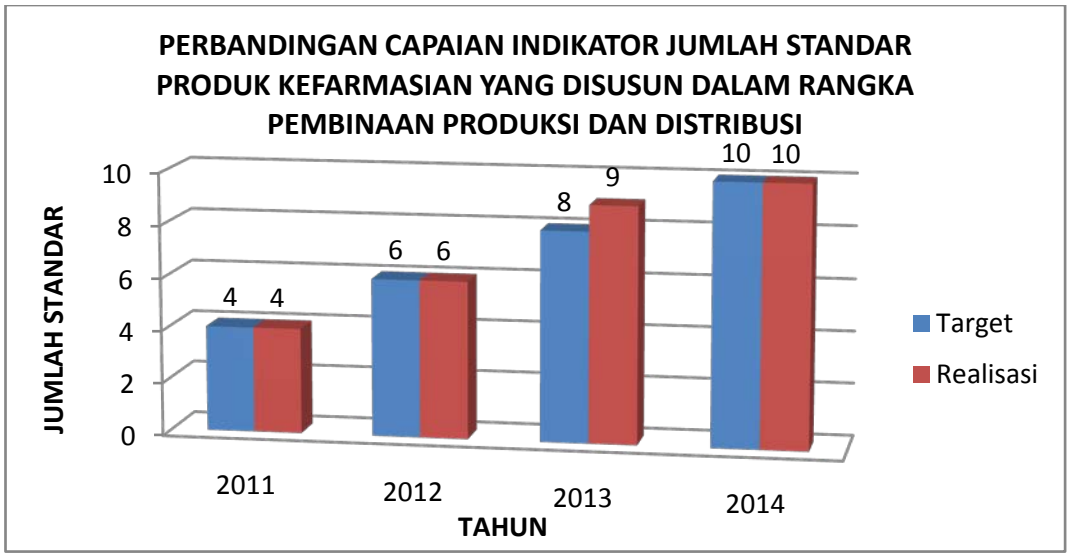

Grafik 2. Perbandingan Capaian Indikator Jumlah Standar Produk Kefarmasian yang Disusun dalam Rangka Pembinaan Produksi dan Distribusi

Dalam mencapai indikator jumlah standar produk kefarmasian, pada tahun 2014 telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Daftar Tilik Pembinaan UMOT dan UJG-UJR
2. Penyusunan Pedoman Pembinaan terhadap Sarana Distribusi Obat
3. Penyusunan Kebijakan di Bidang Obat dan/atau Obat Tradisional
4. Pencetakan Produk Sub Direktorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional
5. Revisi Kodeks Makanan Indonesia Tahap I
6. Penyusunan Buku Panduan Makanan Sehat Bagi Petugas
7. Workshop Finalisasi KKI dan MKBAI
8. Pencetakan Produk Sub Direktorat Produksi Kosmetika dan Makanan
9. Penyusunan Pedoman Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi
10. Penyusunan Materi Teknis untuk Pengaturan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
11. Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Farmasi
12. Penyusunan Farmakope Herbal Indonesia Edisi Ii Tahap I
13. Review dan Pecetakan Suplemen Farmakope Herbal Indonesia
14. Review Kebijakan Sediaan Farmasi Khusus
15. Peningkatan Kemampuan Sistem Aplikasi e-Pharm
16. Pengembangan Sistem Pelaporan Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekursor
17. Launching Farmakope Indonesia Edisi V
18. Kajian Perubahan Penggolongan Obat
19. Aliansi Strategis Bidang Obat
20. Aliansi Strategis di Bidang Obat Tradisional
21. Aliansi Strategis di Bidang Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus
22. Peningkatan Mutu Layanan Perizinan
23. Integrasi Sistem Elektronik Perizinan dan Pelaporan

C.3. KEGIATAN PENUNJANG

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian yang menunjang pencapaian indikator dituangkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang meliputi :

1. Evaluasi Kinerja dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Direktorat
2. Penyusunan Rencana Aksi Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2015 - 2019
3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Prodis Kefarmasian
4. Penyusunan Instrumen Pengukuran Kinerja Direktorat
5. Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Bina Prodis Kefarmasian
6. Penyusunan Program dan Kegiatan Direktorat Bina Prodis Kefarmasian

7. Penyusunan RKAKL Direktorat Bina Prodis Kefarmasian
8. Penyusunan Laporan SAK
9. Penyusunan Laporan SIMAK-BMN
10. Fasilitasi Koordinasi Lintas Sektor dan Program
11. Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Prodis Kefarmasian
12. Forum Komunikasi Lintas Sektor dan Lintas Program
13. Peningkatan Kapasitas SDM Direktorat Bina Prodis Kefarmasian
14. Peningkatan Penerapan Sistem e-Report PBF
15. Penerapan e-Licensing Produksi dan Distribusi Kefarmasian
16. Peningkatan Kemampuan Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika (SIPNAP)
17. Pengolahan Data Survey Industri Farmasi
18. Pengolahan Data dan Evaluasi Perizinan Bidang Kosmetika
19. Evaluasi dan Pengolahan Data Perizinan Bidang Obat dan Obat Tradisional
20. Penyusunan Rencana Kebutuhan Narkotika Tahunan
21. Penyusunan Laporan Perizinan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi
22. Survey dan Peninjauan Penerapan ISO 9001:2008
23. Pembekalan CDOB untuk Tenaga Kesehatan Provinsi
24. Workshop Pengaturan Penggunaan Narkotika untuk Penatalaksanaan Nyeri
25. Pembekalan Petugas Kesehatan dalam Pengelolaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi
26. Sosialisasi Sistem Pelaporan Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika ke Industri Farmasi
27. Monitoring Implementasi SIPNAP
28. Monitoring Implementasi e-Report PBF pada Sarana Distribusi
29. Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika
30. Workshop Pembinaan UJG dan UJR
31. Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesehatan Kab/Kota Bidang Obat Tradisional
32. Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesehatan Provinsi dalam Pembinaan Sarana Obat Tradisional
33. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Obat Tradisional
34. Sosialisasi Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) Aman, Bermutu dan Bergizi
35. Pertemuan Tindak Lanjut Pilot Project Peningkatan Daya Saing UKM Kosmetika Nasional
36. Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka Pembinaan di Bidang Pangan
37. Pembinaan terhadap Industri Kosmetika UMKM
38. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kosmetika / Makanan
39. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

D. KEGIATAN PERIZINAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian juga melaksanakan kegiatan perizinan.

1. Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional melaksanakan perizinan yang meliputi Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Pedagang Besar Farmasi, Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat dan Industri Ekstrak Bahan Alam. Jumlah izin yang dikeluarkan selama tahun 2014 adalah sebanyak 442 izin yang terbagi dalam 8 jenis. Sebaran masing-masing perizinan Subdirektorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional yang telah diterbitkan pada tahun 2014 dapat dilihat pada Grafik 3.

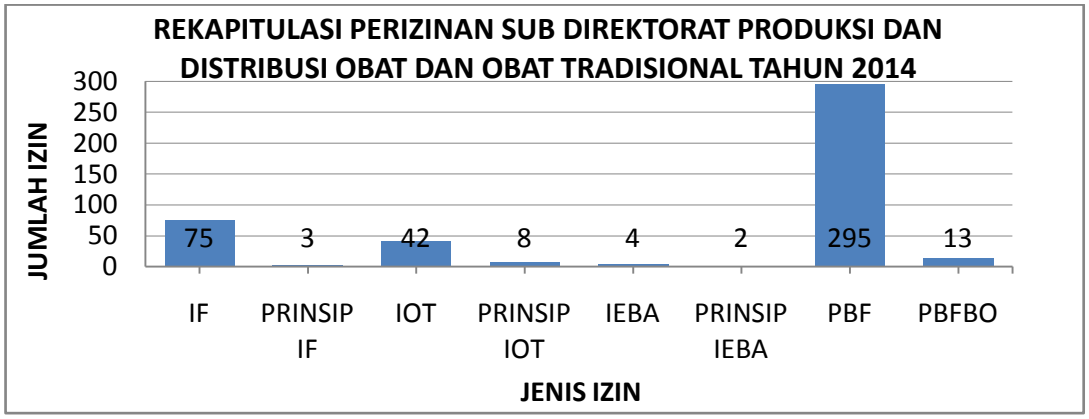

Grafik 3. Rekapitulasi Perizinan Sub Direktorat Produksi dan Distribusi Obat dan Obat Tradisional Tahun 2014

2. Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan melaksanakan perizinan di bidang produksi kosmetika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahun 2013, jumlah izin produksi kosmetika yang masuk adalah sebanyak 106 buah, ditambah dengan jumlah izin yang masuk di tahun sebelumnya sehingga jumlah yang diterbitkan adalah sebanyak 117 buah izin, dengan rincian 83 izin baru dan 34 berkas perubahan izin. Sebaran masing-masing perizinan Subdirektorat Produksi Kosmetika dan Makanan yang telah diterbitkan pada tahun 2014 dapat dilihat pada Grafik 4.

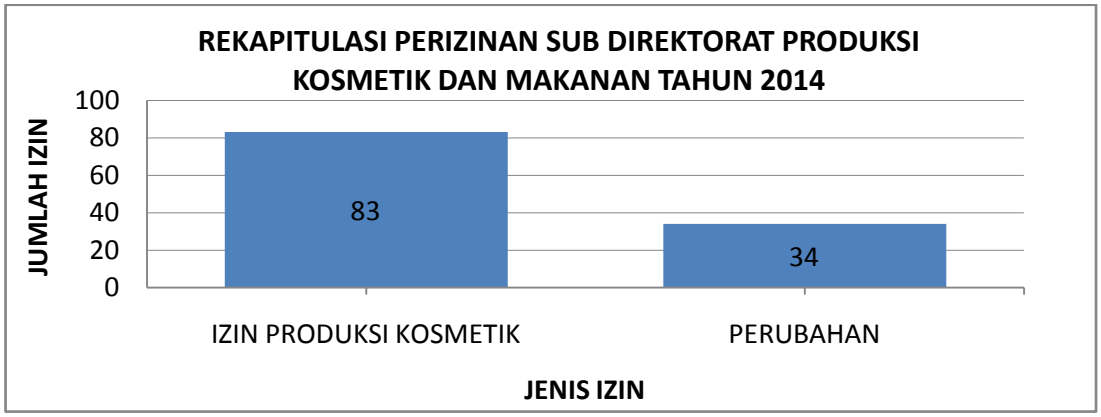

Grafik 4. Rekapitulasi Perizinan Sub Direktorat Produksi Kosmetik dan Makanan Tahun 2014

3. Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus menerbitkan izin di bidang impor / ekspor narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi yang terdiri dari Surat Persetujuan Impor (SPI), Surat Persetujuan Ekspor (SPE), Importir Produsen (IP), Eksportir Produsen (EP), Importir Terdaftar (IT), Eksportir Terdaftar (ET) dan *Special Access Scheme* (SAS). Rekapitulasi perizinan Subdirektorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus yang telah diterbitkan pada tahun 2013 dapat dilihat pada Grafik 5.

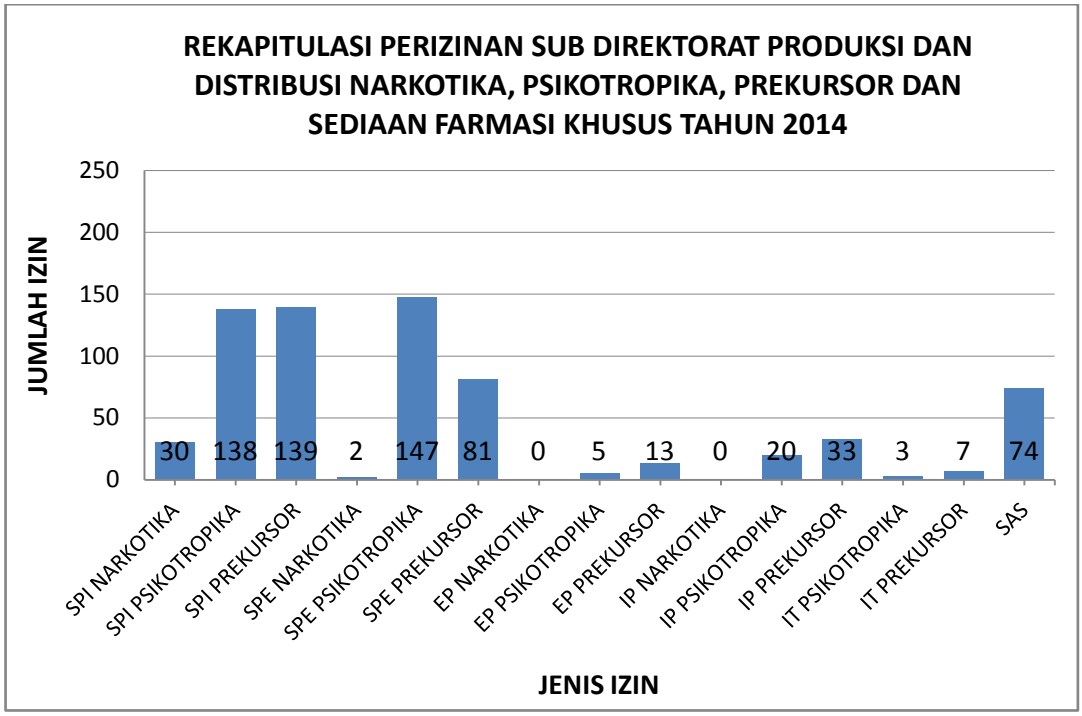

Grafik 5. Rekapitulasi Perizinan Sub Direktorat Produksi dan Distribusi Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Sediaan Farmasi Khusus Tahun 2014

E. REALISASI ANGGARAN

Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Ditjen Binfar dan Alkes dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Ditjen Binfar dan Alkes tahun 2014 sebesar Rp 63.611.450.000,- yang terdiri dari RM sebesar Rp 63.111.450.000,- (99.21%) dan PNBP sebesar Rp 500.000.000,- (0.79%). Anggaran tersebut digunakan untuk belanja modal sebesar Rp 763.007.000,- (1.20%) dan belanja barang sebesar Rp 62.848.443.000,- (98.80%). Tidak terdapat dana dekonsentrasi dan dana hibah pada Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Adapun realisasi penggunaan anggaran Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Ditjen Binfar dan Alkes tahun 2014 adalah sebesar Rp. 49.152.062.567 (77,27%).

Tabel 10. Realisasi Anggaran DIPA Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Tahun 2014

KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	REALISASI	
		(Rp.)	(%)
Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian	63.611.450.000	49.152.062.567	77,27

Realisasi anggaran sebesar 77,27% ini di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya revisi anggaran disebabkan efisiensi, sehingga harus melakukan penyesuaian program kegiatan dan waktu pelaksanaan.
2. Gagal lelang konsultan roadmap pengembangan industri farmasi.
3. Gagal lelang konsultan Detail Engineering Design (DED) untuk PED dan P4TO.
4. Adanya fluktuasi harga tiket pesawat terbang.
5. Adanya Peraturan Menteri untuk tidak melaksanakan Kegiatan di hotel sejak bulan Desember 2014.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian 2014 merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Pada tahun 2014 telah dapat merealisasikan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan distribusi kefarmasian dalam pelaksanaan tugas teknis sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 - 2014. Kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian Ditjen Binfar dan Alkes di tahun 2014 meningkat bila dibandingkan dengan kinerja tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2014 diharapkan dapat menjadi acuan melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada periode berikutnya sehingga kegiatan-kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efiesien. Sedangkan hambatan atau masalah yang muncul dalam mencapai target kinerja diharapkan dapat dicarikan solusi pemecahaan masalah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian diharapkan dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAMPIRAN 1
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Tahun : 2014

Luaran / Output	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian 2. Meningkatnya kualitas produksi dan distribusi kefarmasian 3. Meningkatnya jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri	1. Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri.	45 jenis
	2. Jumlah standar produk kefarmasian yang disusun dalam rangka pembinaan produksi dan distribusi	10 standar

LAMPIRAN 2
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Tahun : 2014

LUARAN/OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1. Meningkatnya produksi bahan baku obat dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian 2. Meningkatnya kualitas produksi dan distribusi kefarmasian 3. Meningkatnya produksi bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri	1. Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional produksi di dalam negeri	45 Jenis	81 Jenis	180 %
	2. Jumlah standar produk kefarmasian yang disusun dalam rangka pembinaan produksi dan distribusi	10 standar	10 standar	100 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2014 sebesar Rp.63.611.450.000,-
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2014 sebesar Rp.49.152.062.567,-
Persentase Realisasi sebesar 77,27%

LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2014

Gambar 1. Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Gambar 2. Pertemuan Forum Komunikasi Lintas Sektor dan Lintas Program Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Gambar 3. Acara Bugar Dengan Jamu Peringatan Hari Kesehatan Nasional

Gambar 4. Pertemuan Workshop Pembinaan UJG - UJR

Gambar 5. Pertemuan Sosialisasi Makanan Jajanan anak Sekolah (MJAS) Aman, Bermutu dan Bergizi

Gambar 6. Pertemuan Evaluasi Pilot Project Peningkatan Daya Saing UKM Kosmetika Nasional

Gambar 7. Pertemuan Pembekalan Petugas Kesehatan dalam Pengelolaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi

Gambar 8. Pertemuan Sosialisasi dan Koordinasi dalam Rangka Fasilitasi P4TO dan PED

Gambar 9. Pertemuan Penandatanganan MoU, PKS dan Kontrak Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Produksi BBO dan BBOT

Gambar 10. Pertemuan Coaching Sistem e-Report PBF bagi Petugas Provinsi